

**ANALISIS PENILAIAN KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN SISWA KELAS  
X IPS MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN (PPKn) DI SMA NEGERI 1 SUKOHARJO  
PADA SEMESTER II TAHUN AJARAN 2016/2017<sup>1</sup>**

Oleh :

Dewi Wulandari, Muh Hendri Nuryadi & Wijianto<sup>2</sup>

Alamat *E-mail*: wienupi@gmail.com

**ABSTRACT**

*Assessment analysis of the tenth graders social science civic skills at courses subjects Pancasila and Civic Education in Negeri 1 Sukoharjo high school second semester academic year 2016/2017 is conducted from the planning stage of civic skills assessment, preparation of civic skills assessment instrument, data collection of civic skills, processing and analyzing data of civic skills assessment. The purpose of this study was to analyze assessment instrumen, the teacher constraints and solution to overcome obstacles in organizing civic skills assessment (intellectual and participatory civic skills) of the tenth graders Social Science at courses subjects Pancasila And Civic Education in Negeri 1 Sukoharjo High School second semester academic year 2016/2017. This research is included in qualitative descriptive research by using purposive sampling technique. The subjects of this study include teachers of Pancasila and Civic Education course subject and ten graders of Social Science proficiency. The data collection technique is done by technically studying documents, interviews, oral test and observation. The technique of data analysis is done by data reduction, data presentation, conclusion and verification. The result of this research shows that the instrument of intellectual civic skills developed by the teachers of Pancasila and Civic Education ten class Social Science at Negeri 1 Sukoharjo High School in second semester academic year 2016/2017 less meet the content validity and construct validity because it is less able to reflect predetermined competency. and does not measure theoretical construct of the ability to analyze, ability to evaluate, ability to take and defend an position of public issue. While the participatory civic skills assessment instrument developed by the teachers of Pancasila and Civic Education has fulfilled the content validity because it has measured the predetermined competency. However, the participatory civic skills assessment instrument developed by the teachers of Pancasila and Civic Education ten class Social Science at Negeri 1 Sukoharjo High School in second semester academic year 2016/2017 lacks the construct validity but it is unable to measure the theoretical constructs of monitoring ability and influence ability. Obstacles faced by the teachers of Pancasila and Civic Education ten class Social Science at Negeri 1 Sukoharjo High School in preparing the instrument of civic skills assessment actually lies in the level of ability or competence possessed by the teacher it self in*

---

<sup>1</sup> Artikel Penelitian

<sup>2</sup> Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta

*conducting the assessment. Solution to overcome teacher obstacles in formulating student civic skills assesment tool can be done throught the improvement of teacher competence.*

**Keyword: Learning Assessment Instrument, Intellectual Civic Skills, Participatory Civic Skills.**

## PENDAHULUAN

Seorang guru dalam menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar siswa, disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu. Penyelenggaraan penilaian proses dan hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), memiliki kekhasan berkenaan dengan karakteristik bidang studinya. Mata pelajaran PPKn merupakan bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan atau *Citizenship Education* untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik. John J. Cogan (Winarno, 2014: 4) membedakan istilah pendidikan kewarganegaraan dalam dua pengertian. Pendidikan kewarganegaraan dalam arti sempit yaitu "*civic education*", sebagai bentuk pendidikan formal, seperti mata pelajaran, mata kuliah atau kursus di lembaga sekolah, universitas atau lembaga formal lain.

Secara konseptual dan teoritik, pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga komponen utama, yaitu *civic knowledge*, *civic disposition* dan *civic skills*. Keterampilan kewarganegaraan atau *civic skills*, merupakan keterampilan yang

dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Margaret Stimann Branson, tentang komponen utama Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya komponen *civic skills* mencakup dua kategori, yaitu keterampilan intelektual atau *intellectual civic skills*) dan keterampilan partisipasi atau *participatory civic skills* (Branson dalam Winarno, 2014: 26).

Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggungjawab adalah keterampilan berpikir kritis. Branson mengutip simpulan dari penelitian *The National Standarts of Civic and Government* dan *The Civic Framework for 1998 National Assessment of Education Progress (NAEP)* (2000: 4) yang membuat ketegori mengenai komponen keterampilan intelektual meliputi kemampuan mengidentifikasi, menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, mengambil dan mempertahankan pendapat/posisi. Pengembangan sub ranah

keterampilan kewarganegaraan yang lainnya adalah kemampuan berpartisipasi. Mengenai keterampilan partisipasi kewarganegaraan menurut Branson (dalam Cholisin, 2004: 8) yang menyimpulkan bahwa kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggungjawab, efektif, dan ilmiah dalam proses politik dan pemerintahan adalah kecakapan/keterampilan partisipatif yang mencakup kemampuan berinteraksi/ *interacting*, kemampuan memantau/ *monitoring* masalah politik dan pemerintah terutama dalam penanganan persoalan-persoalan publik dan kemampuan mempengaruhi/ *influencing* proses politik, pemerintahan baik secara formal maupun informal. Kendati demikian, guru mata pelajaran PPKn perlu menyusun instrumen penilaian keterampilan kewarganegaraan yang mampu menilai *intellectual* dan *participatory civic skills* siswa.

Akan tetapi pada kenyataannya, peneliti menjumpai masalah terkait dengan penyusunan instrumen penilaian keterampilan kewarganegaraan siswa kelas X IPS yang disusun oleh guru mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Sukoharjo pada semester II tahun ajaran 2016/2017. Berdasarkan studi pendahuluan, menunjukkan bahwa instrumen penilaian yang disusun oleh guru mata pelajaran Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X IPS di SMA Negeri 1 Sukoharjo belum mampu mengukur keterampilan kewarganegaraan/ *civic skills* siswa baik keterampilan intelektual kewarganegaraan/ *intellectual civic skills* ataupun keterampilan partisipasi kewarganegaraan/ *participatory civic skills* siswa. Alasan mengapa bagi seorang guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu untuk menyusun instrumen penilaian yang mampu mengukur keterampilan kewarganegaraan siswa adalah untuk mengetahui seberapa jauh kecakapan atau keterampilan kewarganegaraan siswa untuk berperan serta secara aktif dalam masyarakat. Untuk berperan aktif tersebut diperlukan kecakapan berpikir kritis tentang isu politik tertentu, misalnya seseorang harus memahami terlebih dahulu isu itu, sejarahnya, dan relevansinya dimasa kini, juga serangkaian alat intelektual atau pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan isu itu (Branson dalam Winarno, 2014: 26).

Perumusan tujuan pembelajaran (pada kurikulum 2013 tujuan pembelajaran berupa kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi) yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada kompetensi dasar 3.5 Menganalisis faktor-faktor

pembentuk Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika yaitu Menganalisis Kebhinekaan Bangsa Indonesia, Konsep Integrasi Nasional, Faktor-faktor Pembentuk Integrasi Nasional, Tantangan dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peran serta Warga Negara dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan.

Sedangkan tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada kompetensi dasar 3.6 Memprediksi ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika yaitu sebagai berikut: (1) Siswa mampu memahami ancaman negara terhadap integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (2) Siswa mampu mengidentifikasi dan membedakan ancaman militer dan non militer; dan (3) Siswa mampu mengidentifikasi isu-isu berkaitan dengan ancaman IPOLEKSOSBUDHANKAM.

Kemudian tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada kompetensi dasar 3.7 Mengkarakteristikan arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut: (1) Peserta didik mampu

mengidentifikasi wawasan nusantara; (2) Peserta didik dapat mendeskripsikan kedudukan fungsi dan tujuan wawasan nusantara; (3) Peserta didik mampu mengkarakteristikan aspek trigatra dan pancagatra dalam wawasan nusantara; dan (4) Peserta didik dapat menganalisis peran serta warga Negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan.

Berdasarkan rumusan tujuan di atas, dapat diketahui bahwa guru mata pelajaran PPKn belum mampu mengembangkan rumusan tujuan pembelajaran yang mengarah pada pencapaian kompetensi keterampilan intelektual maupun partisipasi kewarganegaraan siswa secara maksimal, sehingga penilaian yang dilakukan guru mata pelajaran PPKn juga belum menekankan pada aspek-aspek yang mampu mengukur keterampilan kewarganegaraan pada diri siswa. Kendati demikian, dapat dengan jelas diketahui bahwa guru mata pelajaran PPKn kelas X IPS di SMA Negeri 1 Sukoharjo lebih menekankan pada pencapaian pengetahuan kewarganegaraan/ *civic knowledge* siswa.

Hal ini menarik untuk diteliti, sejalan dengan simpulan yang dikemukakan oleh Winarno (2014: 167) bahwa kecenderungan pembelajaran PPKn hanya berorientasi pada pemahaman akan *civic knowledge* perlu diubah, apalagi sebatas mengajarkan konsep-konsep

keilmuan PKN yang sifatnya hafalan, oleh karena itu orientasi pada *civic knowledge* harus dilanjutkan pada pengembangan sub ranah *intellectual civic skills* dan mengembangkan sub ranah *participatory civic skills* sebagai bagian dari *civic skills*. Lebih lanjut Winarno (2014; 167) menjelaskan bahwa dalam mengembangkan desain pembelajaran PKN untuk mengembangkan *civic skills* siswa baik keterampilan intelektual maupun partisipasi kewarganegaraan perlu bagi guru PKN untuk menyusun evaluasi pembelajaran yang sesuai untuk mengukur ketercapaian keterampilan intelektual dan partisipasi pada diri siswa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka guru PKN menyusun instrumen untuk penilaian ranah psikomotor, tetapi yang berhubungan dengan aspek *intellectual* dan *participatory civic skills*.

Berdasarkan studi pendahuluan di atas, terlihat bahwa guru mata pelajaran PPKn kelas X IPS di SMA Negeri 1 Sukoharjo belum mampu menyusun instrumen penilaian keterampilan kewarganegaraan siswa, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang penilaian keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa kelas X IPS di SMA Negeri 1 Sukoharjo pada semester II yang mengadopsi pada teori Margaret Stimann Branson.

Tujuan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil analisis instrumen penilaian keterampilan kewarganegaraan siswa kelas X IPS mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Sukoharjo pada semester II tahun ajaran 2016/2017.
2. Untuk mengetahui kendala guru dalam mengembangkan instrumen penilaian keterampilan kewarganegaraan siswa kelas X IPS mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Sukoharjo pada semester II tahun ajaran 2016/2017.
3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala guru dalam menyusun instrumen penilaian keterampilan kewarganegaraan siswa kelas X IPS mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Sukoharjo pada semester II tahun ajaran 2016/2017.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Sukoharjo yang beralamatkan di Jl. Pemuda No. 38 Jetis Sukoharjo Jawa Tengah, pada semester II tahun pelajaran 2016/2017. Waktu penelitian dilaksanakan setelah mendapat perijinan dari pihak yang berwenang. Penelitian ini direncanakan mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 yang meliputi: tahap persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, analisis data dan penyusunan laporan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015: 15).

Peneliti menggunakan sumber data yang berupa informan, peristiwa atau aktivitas serta arsip dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Menurut Lofland (Lexy. J. Moleong, 2012: 157) berpendapat bahwa, "Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Teknik pengambilan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yang bertujuan untuk memperoleh kedalaman data yang berkaitan dengan tujuan atau masalah yang diteliti. Berkaitan dengan teknik ini, Nasution

(Sugiyono, 2015: 302) menjelaskan bahwa:

Sampel *purposive*, penentuan unit sampel (responden) dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf "*redudancy*" (datanya telah jenuh, ditambah sampel lagi tidak memberikan informasi yang baru), artinya bahwa dengan menggunakan sumber data selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan analisis studi dokumen. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X IPS dan IPA/ Bahasa dan beberapa siswa kelas X IPS di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Observasi ini dilakukan dengan mengamati proses pelaksanaan penilaian di kelas dan proses belajar mengajar. Dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini di antaranya Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan instrumen penilaian hasil belajar kognitif siswa yang disusun oleh guru mata pelajaran PPKn pada semester II.

Validitas data menggunakan triangulasi data dan metode. Penelitian ini menggunakan triangulasi data dan triangulasi

metode karena untuk menutup kemungkinan apabila ada kekurangan data dari salah satu sumber atau salah satu metode, maka dapat dilengkapi dengan data dari sumber atau metode lain. Dengan cara seperti itu maka data yang didapatkan dari jawaban para informan telah valid untuk digunakan sebagai data yang akan dianalisis dalam penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil analisis instrumen penilaian keterampilan kewarganegaraan kelas X IPS mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Sukoharjo pada semester II tahun ajaran 2016/2017**

Sebagai alat/ instrumen penilaian yang dapat memberikan hasil informasi untuk perumusan berbagai keputusan penting dalam pengajaran, tes merupakan bagian vital yang harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan ciri-ciri tes yang bermutu. Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen penilaian yang valid akan menghasilkan data yang valid pula atau juga dapat dikatakan bahwa jika data yang dihasilkan dari instrumen valid maka instrumen tersebut juga valid.

Berdasarkan hasil analisis butir soal secara kualitatif yang dilakukan oleh *expert judgement* yakni Anita Trisiana selaku Dosen FKIP PPKn UNISRI dapat dilaporkan bahwa butir-butir soal atau aitem-aitem dalam tes yang disusun oleh guru mata pelajaran PPKn memiliki kualitas yang baik dan memenuhi validitas isi. Hasil analisis terhadap tes yang beliau lakukan terhadap ranah materi menunjukkan bahwa materi yang ditanyakan telah sesuai dengan kompetensi yang diukur, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan telah sesuai dan isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang, jenis sekolah atau tingkat kelas.

Sedangkan hasil analisis terhadap tes yang beliau lakukan terhadap ranah konstruksi menunjukkan bahwa aitem-aitem dalam tes telah menggunakan kata perintah yang menuntut jawaban terurai, petunjuk cara mengerjakan soal jelas dan pedoman penskoran sesuai dengan kaidah atau aturan baku. Kemudian hasil analisis terhadap tes yang beliau lakukan terhadap ranah bahasa menunjukkan bahwa rumusan kalimat yang terdapat tes komunikatif, penulisannya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan kata atau ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda dan terhindar dari bahasa yang berlaku setempat/ tabu.

Sementara itu, berdasarkan hasil analisis butir soal secara kualitatif yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa aitem-aitem atau butir-butir yang terdapat dalam soal-soal tes yang disusun oleh guru mata pelajaran PPKn untuk mengukur pemahaman atau penguasaan siswa terhadap materi pokok: (1) Integrasi Nasional dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika; (2) Ancaman Terhadap Negara dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika; dan (3) Wawasan Nusantara dalam Konteks NKRI tidak ditulis sesuai dengan *blue-print* nya, yakni kurang mampu mencerminkan domain isi dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Soal-soal tes tersebut artinya belum mampu mengukur seluruh cakupan substansi yang ingin diukur, sehingga dapat dikatakan bahwa tes tersebut kurang memenuhi validitas isi (*content validity*).

Hal tersebut sejalan dengan Azwar (2015: 42) yang menyatakan sebagai berikut: Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap kelayakan atau relevansi isi tes melalui analisis rasional oleh panel yang berkompoten atau melalui *expert judgement*. Pertanyaan yang dicari jawabannya dalam validitas ini adalah “apakah masing-masing aitem dalam tes layak untuk mengungkap atribut yang diukur sesuai dengan indikator keperilakuannya” dan

“apakah aitem-aitem dalam tes telah mencakup keseluruhan *domain* isi yang hendak diukur.

Berdasarkan data hasil temuan penelitian, soal tes yang disusun oleh guru mata pelajaran PPKn untuk mengukur pemahaman atau penguasaan siswa terhadap materi pokok Integrasi Nasional dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika disusun sebanyak 4 (empat) kode soal dengan bentuk uraian terbatas. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran PPKn, beliau menyatakan sebagai berikut:

Pada ulangan harian I, saya membuat 4 (empat) kode soal yang berbentuk tes uraian objektif yang masing-masing akan diujikan di kelas X IPS 1, X IPS 2, X IPS 3 dan X IPS 4. Setiap kode soal saya buat sebanyak 5 (lima) butir soal uraian dengan alokasi waktu 90 menit atau 2x jam pelajaran (Kutipan Wawancara I).

Berdasarkan hasil analisis dan observasi, soal-soal tes yang terdapat dalam Ulangan Harian ke-1 kelas X IPS 1 dan X IPS 2 yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran PPKn kurang memenuhi validitas isi sebab tidak mampu mengukur indikator pencapaian kompetensi: (1) Menganalisis faktor-faktor penghambat proses Integrasi Nasional; (2) Menganalisis tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal-soal tes yang terdapat dalam Ulangan

Harian ke-1 kelas X IPS 1 dan X IPS 2 yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran PPKn hanya mampu mengukur indikator pencapaian kompetensi: (1) Menganalisis kebhinekaan bangsa Indonesia; (2) Menganalisis konsep Integrasi Nasional; (3) Menganalisis faktor-faktor pendorong Integrasi Nasional; dan (4) Menganalisis peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan

Berdasarkan hasil analisis dan observasi, soal-soal tes yang terdapat dalam Ulangan Harian ke-1 kelas X IPS 3 kurang memenuhi validitas isi sebab tidak mampu mengukur indikator pencapaian kompetensi: (1) Menganalisis kebhinekaan bangsa Indonesia; dan (2) Menganalisis tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Soal-soal tes yang terdapat dalam Ulangan Harian ke-1 kelas X IPS 3 yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran PPKn hanya mampu mengukur indikator pencapaian kompetensi: (1) Menganalisis konsep Integrasi Nasional; (2) Menganalisis faktor-faktor pendorong dan pengambat Integrasi Nasional; dan (3) Menganalisis peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan hasil analisis dan observasi, soal-soal tes yang terdapat dalam Ulangan Harian ke-1 kelas X IPS 4 kurang memenuhi validitas isi sebab tidak mampu mengukur indikator pencapaian kompetensi: (1)

Menganalisis konsep Integrasi Nasional; (2) Menganalisis faktor-faktor penghambat Integrasi Nasional; dan (3) Menganalisis peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Soal-soal tes yang terdapat dalam Ulangan Harian ke-1 kelas X IPS 4 yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran PPKn hanya mampu mengukur indikator pencapaian kompetensi: (1) Menganalisis kebhinekaan bangsa Indonesia; (2) Menganalisis faktor-faktor pendorong Integrasi Nasional dan; (3) Menganalisis tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI.

Berdasarkan data hasil temuan penelitian, soal tes yang disusun oleh guru mata pelajaran PPKn untuk mengukur pemahaman atau penguasaan siswa terhadap materi pokok Ancaman Terhadap Negara dalam konteks Bhineka Tunggal Ika, disusun sebanyak 2 (dua) kode soal dengan bentuk uraian terbatas. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan guru mata pelajaran PPKn, beliau menyatakan bahwa, "... Sedangkan pada ulangan harian II, saya membuat 2 (dua) kode soal uraian" (Kutipan Wawancara I).

Berdasarkan hasil analisis dan observasi, soal-soal tes yang terdapat dalam Ulangan Harian ke-II kelas X IPS 1 dan X IPS 4 yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran PPKn kurang memenuhi validitas isi sebab

tidak mampu mengukur indikator pencapaian kompetensi: menganalisis bentuk-bentuk ancaman non-militer di bidang ideologi, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Soal-soal tes yang terdapat dalam Ulangan Harian ke-II kelas X IPS 1 dan X IPS 4 yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran PPKn hanya mampu mengukur indikator pencapaian kompetensi: (1) Mengidentifikasi hakikat ancaman militer dan bentuk-bentuk ancaman militer; (2) Menganalisis bentuk-bentuk ancaman non-militer di bidang politik, sosial budaya; (3) Menganalisis peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun Integrasi Nasional.

Berdasarkan data hasil temuan penelitian, soal tes yang disusun oleh guru mata pelajaran PPKn untuk mengukur pemahaman atau penguasaan siswa terhadap materi pokok Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia disusun sebanyak 1 (satu) kode soal dengan bentuk uraian terbatas. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan guru mata pelajaran PPKn, beliau menyatakan bahwa, "... Selanjutnya pada ulangan harian III saya hanya membuat 1 (satu) kode soal uraian yang berisi 5 (lima) butir soal yang harus dikerjakan oleh siswa selama 2x 45 menit" (Kutipan Wawancara I).

Berdasarkan hasil analisis dan observasi, soal-soal tes yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran PPKn kurang memenuhi validitas isi sebab tidak mampu mengukur indikator pencapaian kompetensi: (1) Mendeskripsikan kedudukan dan tujuan Wawasan Nusantara; dan (2) Menganalisis peran serta warga negara dalam mendukung implemmentasi Wawasan Kebangsaan. Soal-soal tes yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran PPKn hanya mampu mengukur indikator pencapaian kompetensi: (1) Mengidentifikasi Wawasan Nusantara; (2) Mendeskripsikan fungsi Wawasan Nusantara; (3) Mengakarakteristikkan aspek trigatra dan pancagatra dalam Wawasan Nusantara; (4) menganalisis peranan siswa dalam mendukung implementasi Wawasan Nusantara.

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan guru mata pelajaran PPKn yang menjelaskan sebagai berikut:

Kendala adalah dalam membuat soal yang berbentuk uraian adalah tidak bisa mengukur semua indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi jika soal uraiannya saya buat sebanyak 10 (sepuluh) soal, maka dalam mengoreksi hasil tes membutuhkan waktu yang semakin banyak dalam mengoreksi dan siswa juga membutuhkan waktu yang lebih

untuk mengerjakannya (Kutipan Wawancara I).

Sementara itu, berdasarkan hasil analisis dokumen dan observasi juga dapat dilaporkan bahwa penyusunan tes oleh guru mata pelajaran PPKn kurang mendasarkan pada konstruksi teoritis tentang keterampilan intelektual kewarganegaraan/ *intellectual civic skills* yang perlu dimiliki oleh warga negara seperti yang dikemukakan oleh Margaret Stimann Branson. Konstruksi teoritis yang terukur oleh tes yang disusun oleh guru mata pelajaran PPKn yaitu variabel/ indikator: (1) kemampuan mengidentifikasi/ *identifying*; (2) kemampuan menggambarkan/ *describing*; dan (3) kemampuan menjelaskan/ *explaining*. Sedangkan komponen keterampilan intelektual kewarganegaraan yang lain seperti kemampuan menganalisis/ *analyzing*, kemampuan mengevaluasi/ *evaluating*, kemampuan mengambil dan mempertahankan pendapat/ *taking and defending position on public issue*, tidak terukur oleh tes yang disusun oleh guru mata pelajaran PPKn. Artinya, penyusunan instrumen penilaian keterampilan partisipasi kewarganegaraan oleh guru mata pelajaran PPKn tersebut kurang memenuhi validitas konstruk dan tidak mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa.

Hal tersebut sejalan dengan Suryabrata (2005: 42)

menyimpulkan bahwa validitas konstruksi mempersoalkan sejauh mana skor-skor hasil pengukuran dengan instrumen penilaian yang dipersoalkan itu merefleksikan konstruksi teoritis yang mendasari penyusunan alat ukur tersebut. Konstruksi teoritis ini akan tergantung pada ilmu yang mengembangkannya. Oleh karena itu, gambaran mengenai suatu atribut dapat bermacam-macam tergantung kepada teori siapa yang dipergunakan.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan taksonomi Bloom, maka butir-butir dalam tes yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran PPKn tidak mampu mengukur tingkat berpikir siswa pada level menganalisis/ *analyze* (C4) sampai pada tingkat berpikir di atasnya. Hal ini sejalan dengan Yulaelawati (2004: ) yang menyatakan sebagai berikut:

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) bisa disejajarkan dengan domain atau ranah kognitif, keterampilan/ kecapakan kewarganegaraan (*civic skills*) sejajar dengan domain atau ranah psikomotor, sedangkan sikap/ watak kewarganegaraan (*civic disposition*) sejajar dengan domain atau ranah afektif.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis butir soal secara kualitatif yang dilakukan oleh *expert judgement* yakni Anita Trisiana selaku Dosen

FKIP PPKn UNISRI dapat dilaporkan bahwa butir-butir atau aitem-aitem yang terdapat dalam instrumen penilaian partisipasi yang disusun oleh guru mata pelajaran PPKn memiliki kualitas yang baik dan memenuhi validitas isi. Hasil analisis terhadap tes yang beliau lakukan terhadap ranah materi menunjukkan bahwa materi yang ditanyakan telah sesuai dengan kompetensi yang diukur, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan telah sesuai dan isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang, jenis sekolah atau tingkat kelas.

Sedangkan hasil analisis terhadap tes yang beliau lakukan terhadap ranah konstruksi menunjukkan bahwa aitem-aitem dalam tes telah menggunakan kata perintah yang menuntut perbuatan praktik, petunjuk cara mengerjakan soal jelas dan pedoman penskoran sesuai dengan kaidah atau aturan baku. Kemudian hasil analisis terhadap tes yang beliau lakukan terhadap ranah bahasa menunjukkan bahwa rumusan kalimat yang terdapat tes komunikatif, penulisannya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan kata atau ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda dan terhindar dari bahasa yang berlaku setempat/ tabu.

Sementara itu, berdasarkan hasil analisis butir soal secara kualitatif dan hasil observasi yang

dilakukan oleh peneliti dapat dilaporkan bahwa butir-butir atau aitem-aitem yang terdapat dalam instrumen penilaian keterampilan partisipasi kewarganegaraan yang disusun oleh guru mata pelajaran PPKn telah memenuhi validitas isi, sebab telah mengukur domain isi yang telah ditetapkan semula. Akan tetapi instrumen penilaian yang dipilih tidak sesuai dengan teknik penilaian yang digunakan. Teknik penilaian yang dipilih oleh guru mata pelajaran PPKn adalah penilaian proyek, sedangkan instrumen penilaian yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran PPKn adalah lembar pengamatan kinerja presentasi.

Hal tersebut sejalan dengan Mansyur dkk (2015: 305) yang menyimpulkan bahwa *content validity* (validitas isi) ditetapkan menurut analisis rasional terhadap isi tes yang penilaiannya didasarkan atas pertimbangan subjektif individual yang menjawab pertanyaan tentang "Sejauh mana butir-butir tes itu mencangkup keseluruhan kawasan yang ingin diukur oleh tes tersebut".

Selain itu, berdasarkan hasil analisis dan observasi juga dapat dilaporkan bahwa penyusunan instrumen penilaian keterampilan partisipasi kewarganegaraan yang disusun oleh guru mata pelajaran PPKn kurang memenuhi validitas konstruk sebab kurang mendasarkan

pada konstruksi teoritis tentang keterampilan partisipasi kewarganegaraan/*participatory civic skills* yang perlu dimiliki oleh warga negara seperti yang dikemukakan oleh Margaret Stimann Branson. Konstruksi teoritis yang terukur oleh tes yang disusun oleh guru mata pelajaran PPKn yaitu variabel/indikator kemampuan berinteraksi/*interacting*. Sedangkan komponen keterampilan partisipasi kewarganegaraan yang lain seperti kemampuan memantau/*monitoring* dan kemampuan mempengaruhi/*influencing* tidak terukur oleh instrumen penilaian keterampilan partisipasi kewarganegaraan yang disusun guru mata pelajaran PPKn. Artinya, penyusunan instrumen penilaian partisipasi kewarganegaraan oleh guru mata pelajaran PPKn tersebut kurang memenuhi validitas konstruk. Hal ini sejalan dengan Azwar (2014: 175) yang menyatakan bahwa, "Validitas konstruk adalah validitas yang menunjukkan sejauh mana suatu tes mengukur *trait* atau konstruk teoritik yang hendak diukurnya".

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa instrumen penilaian keterampilan intelektual kewarganegaraan yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran PPKn kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukoharjo kurang memenuhi validitas isi (*content validity*) dan validitas konstruk

(*construct validity*) sebab kurang mampu mencerminkan domain isi yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak mengukur konstruksi teoritis tentang kemampuan menganalisis/*analyzing*, kemampuan mengevaluasi/*evaluating*, kemampuan mengambil dan mempertahankan pendapat/*taking and defending position on public issue*. Sedangkan instrumen penilaian keterampilan partisipasi kewarganegaraan yang dibuat oleh guru mata pelajaran PPKn telah memenuhi validitas isi (*content validity*) sebab telah mengukur domain isi yang telah ditetapkan semula. Akan tetapi instrumen penilaian partisipasi kewarganegaraan tersebut kurang memenuhi validitas konstruk (*construct validity*) sebab tidak mampu mengukur konstruksi teoritis tentang kemampuan memantau/*monitoring* dan kemampuan mempengaruhi/*influencing*.

## **2. Kendala guru dalam menyusun instrumen penilaian keterampilan kewarganegaraan siswa kelas X IPS mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Sukoharjo pada semester II tahun ajaran 2016/2017**

Kendala guru yang dihadapi oleh guru mata pelajaran PPKn dalam menyusun instrumen penilaian keterampilan intelektual kewarganegaraan/*intellectual civic*

*skills* siswa sebenarnya terletak pada tingkat kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh guru itu sendiri dalam menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar siswa.

### **3. Solusi untuk mengatasi kendala guru dalam menyusun instrumen penilaian keterampilan kewarganegaraan siswa kelas X IPS mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Sukoharjo pada semester II tahun ajaran 2016/2017**

Solusi untuk mengatasi kendala guru dalam menyusun instrumen penilaian keterampilan kewarganegaraan siswa dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru. Upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam hal ini dapat dilakukan melalui supervisi akademik. Supervisi akademik sama maksudnya dengan konsep supervisi pendidikan (*educational supervision*) atau juga sering disebut dengan istilah *Intruksional Supervision* atau *Intruksional Leadership*. Peningkatan kompetensi pedagogik guru melalui supervisi akademik perlu dilakukan secara terprogram, terstruktur dan berkelanjutan melalui pembinaan orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi seperti kepala sekolah ataupun seseorang yang ahli/profesional dalam bidang penilaian pendidikan mata pelajaran PPKn sehingga mampu menampung

berbagai masalah yang dihadapi oleh guru mata pelajaran PPKn dalam menyelenggarakan penilaian pembelajaran yang lebih menekankan pada pencapaian kompetensi keterampilan kewarganegaraan siswa.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Instrumen penilaian keterampilan intelektual kewarganegaraan yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran PPKn kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukoharjo kurang memenuhi validitas isi (*content validity*) dan validitas konstruk (*construct validity*) sebab kurang mampu mencerminkan domain isi yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak mengukur konstruksi teoritis tentang kemampuan menganalisis/*analyzing*, kemampuan mengevaluasi/*evaluating*, kemampuan mengambil dan mempertahankan pendapat/*taking and defending position on public issue*. Sedangkan instrumen penilaian keterampilan partisipasi kewarganegaraan yang dibuat

oleh guru mata pelajaran PPKn telah memenuhi validitas isi (*content validity*) sebab telah mengukur domain isi yang telah ditetapkan semula. Akan tetapi instrumen penilaian partisipasi kewarganegaraan tersebut kurang memenuhi validitas konstruk (*construct validity*) sebab tidak mampu mengukur konstruksi teoritis tentang kemampuan memantau/*monitoring* dan kemampuan mempengaruhi/*influencing*.

2. Kendala guru yang dihadapi oleh guru mata pelajaran PPKn dalam menyusun instrumen penilaian keterampilan intelektual kewarganegaraan/*intellectual civic skills* siswa sebenarnya terletak pada tingkat kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh guru itu sendiri dalam menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar siswa.
3. Solusi untuk mengatasi kendala guru dalam menyusun instrumen penilaian keterampilan kewarganegaraan siswa dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru. Upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam hal ini dapat dilakukan melalui supervisi akademik, yakni melalui pembinaan orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi seperti kepala sekolah

ataupun seseorang yang ahli/profesional dalam bidang penilaian pendidikan mata pelajaran PPKn sehingga mampu menampung berbagai masalah yang dihadapi oleh guru mata pelajaran PPKn dalam menyelenggarakan penilaian pembelajaran yang lebih menekankan pada pencapaian kompetensi keterampilan kewarganegaraan siswa.

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini, adapun saran yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Siswa
  - a. Siswa hendaknya lebih berpartisipasi aktif membahas masalah-masalah sosial secara cerdas dan bertanggung di dalam proses pembelajaran di kelas;
  - b. Siswa hendaknya lebih meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan publik yang ada di masyarakat;
  - c. Siswa hendaknya membangun dan meningkatkan keterampilan partisipatoris mereka sejak awal sekolah dan terus berlanjut selama masa sekolah dengan cara mengikuti organisasi kesiswaan yang ada di sekolah secara cerdas dan bertanggungjawab;

- d. Siswa hendaknya dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kemampuan memantau mereka terhadap penanganan-penanganan masalah publik;
  - e. Siswa hendaknya lebih meningkatkan kemandirian mereka dalam mengikuti tes.
2. Bagi Guru
- a. Guru hendaknya merumuskan tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi yang lebih mengarah pada pengembangan sub keterampilan intelektual dan partisipasi kewarganegaraan siswa secara maksimal;
  - b. Guru hendaknya menyusun kisi-kisi sebelum menyusun instrumen penilaian hasil belajar siswa;
  - c. Guru hendaknya menyusun tes yang mampu mengukur seluruh domain isi yang hendak diukur atau menyusun tes sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan semula;
  - d. Guru hendaknya meningkatkan kemampuannya dalam mengkonstruksi butir-butir soal agar lebih mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan trait atau konstruk teoritik yang hendak diukurnya;
  - e. Guru hendaknya meningkatkan kualitas instrumen penilaian hasil belajar yang mereka kembangkan;
  - f. Guru hendaknya lebih intens untuk membahas masalah-masalah atau isu-isu publik yang *up to date* dan sesuai dengan materi pembelajaran PPKn, bukan hanya sekedar mengajarkan konsep-konsep keilmuan PPKn yang sifatnya hafalan dan kurang mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa;
  - g. Guru hendaknya menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan baik keterampilan intelektual dan partisipasi kewarganegaraan siswa. Pendekatan belajar kontekstual dapat diwujudkan antara lain dengan metode: (1) kooperatif; (2) penemuan (*discovery*); (3) *inquiry*; (4) interaktif; (5) eksploratif; (6) berpikir kritis; (7) pemecahan masalah (*problem solving*);
  - h. Guru hendaknya lebih meningkatkan kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan tes tertulis di kelas.
3. Bagi Sekolah
- a. Pihak sekolah hendaknya menggunakan supervisi akademik untuk memperbaiki kualitas alat/ instrumen

- penilaian hasil belajar siswa yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran PPKn agar lebih valid;
- b. Pihak sekolah hendaknya melatih guru mata pelajaran PPKn agar berpartisipasi aktif dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan partisipasi aktif siswa;
  - c. Pihak sekolah hendaknya menambah alokasi waktu untuk membangun keterampilan partisipasi kewarganegaraan/*participatory civic skills* melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, Pramuka, Palang Merah Remaja dan lain lain;
  - d. Pihak sekolah hendaknya memberikan peluang-peluang yang terencana dan terstruktur dengan baik agar dapat merefleksikan pengalaman-pengalaman siswa dalam hal membangun keterampilan partisipasi kewarganegaraan di bawah bimbingan para pembina yang cakap dan memadai;
  - e. Pihak sekolah hendaknya dapat memfasilitasi guru dalam hal menggangankan atau memperbanyak naskah soal yang akan digunakan untuk tes.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. (2012). *Tes Prestasi. Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin. (2015). *Reliabilitas dan Validitas. Edisi ke-IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cholisin. (2004). *Pengembangan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Dalam Praktek Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Diperoleh dari [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/PARADIGMA%20BARU%20PKN\\_0.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/PARADIGMA%20BARU%20PKN_0.pdf) pada tanggal 3 Februari 2017.
- Jihad, A. dan Haris, A. (2013). *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Kunandar. (2014). *Penialian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013). Suatu Pendekatan Praktis Disertai dengan Contoh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kusaeri. (2014). *Acuan dan Teknik Penilaian Proses dan Hasil Belajar dalam Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Mansyur, Rasyid dan Suratno. (2015). *Assesmen Pembelajaran di Sekolah. Panduan Bagi Guru*

- dan Calon Guru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munthe, Bermawy. (2009). *Desain Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Nugroho, I.A. (2012). *Menulis Tujuan Pembelajaran*. Diperoleh dari <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132319978/pendidikan/Bagaimana+Menu+lis+Tujuan+Pembelajaran.pdf> pada tanggal 25 Juli 2017.
- Sudjana, Nana. (2014). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. (2005). *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*. Yogyakarta: Andi.
- Utari, Retno. (2013). *Taksonomi Bloom. Apa dan Bagaimana Menggunakannya*. Diperoleh dari <http://setiabudi.ac.id/web/images/files/RevisiTaksonomi%20Bloom%20.pdf> pada tanggal 1 Maret 2017.
- Widodo, Ari. (2005). *Taksonomi Tujuan Pembelajaran*. Diperoleh dari [http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR. PEND. BIOLOGI/196705271\\_992031-ARI WIDODO/2005-Revisi Taksonomi Bloom-Didaktis.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR.%20PEND.%20BIOLOGI/196705271_992031-ARI%20WIDODO/2005-Revisi%20Taksonomi%20Bloom-Didaktis.pdf) pada tanggal 1 Maret 2017.
- Widoyoko, E.P. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widoyoko, E.P.(2014). *Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Winarno. (2014). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Isi, Strategi dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara.